



Institute for
Strategic Initiatives
www.insistive.org

Gerakan Buruh dan Eksperimentasi Politik: Studi Kasus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia [FSPMI] di Kabupaten Bekasi

Mohammad Didit Saleh

Peneliti di Institute for Strategic Initiative [ISI] dan kandidat
Master Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Gerakan Buruh dan Eksperimentasi Politik: Studi Kasus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia [FSPMI] di Kab. Bekasi

Mohammad Didit Saleh

Peneliti di Institute for Strategic Initiative [ISI] dan
kandidat Master Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Abstrak

Studi ini menelaah lebih dalam relasi dan interaksi yang dibangun oleh kedua calon legislatif hingga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kab. Bekasi, Nyumarno dan Nurdin, dengan konstituennya terutama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia [FSPMI] Kab. Bekasi pada fase pra elektoral, elektoral, hingga paska elektoral. Lebih dari itu, studi ini pula berupaya untuk mengabstraksikan model representasi yang terbangun antara kedua anggota DPRD tersebut dengan konstituennya terutama dengan FSPMI Kab. Bekasi paska elektoral. Apakah model representasi yang terbangun merupakan representasi simbolik, deskriptif, atau bahkan substantif? Studi ini penting diteliti karena berdasarkan argumentasi bahwa situasi politik di berbagai belahan negara terutama di negara berkembang mengalami defisit demokrasi. Defisit demokrasi ini terjadi karena keterputusan tali mandat antara calon yang dipilih dan terpilih. Keterputusan ini bukan disebabkan oleh tidak adanya kebebasan sipil dan politik, namun ditengarai karena terjadi disfungsi instrumen kontrol publik dalam mengendalikan persoalan kekuasaan terkait kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Temuan studi ini menggambarkan bahwa kedua anggota DPRD, Nyumarno dan Nurdin, memiliki perbedaan dalam membangun relasi dan interaksi dengan konstituennya terutama buruh FSPMI Kab. Bekasi pada fase paska elektoral. Adapun relasi dan interaksi yang terbangun antara Nyumarno dan konstituennya relatif mengarah pada model representasi substantif. Sementara itu, model representasi yang terbangun antara Nurdin dengan konstituennya cenderung mengarah pada model representasi deskriptif.

A. Pendahuluan

Berbicara gerakan buruh dengan politik bukan hal yang baru di Indonesia. Secara historis lahirnya organisasi buruh ini bersamaan dengan awal munculnya industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Munculnya industrialisasi ini menghadirkan buruh, seseorang yang menjual tenaga kerjanya dan tidak memiliki alat produksi. Namun karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan jam kerja, maka para buruh tersebut mengkonsolidasikandiri, yang juga melibatkan kelompok berpendidikan. Aktivitas konsolidasi ini melahirkan serikat buruh.

Adapun serikat pekerja pertama di Indonesia ini adalah serikat buruh kereta api, yaitu *Staatpoorwegen Bond* pada 1905 dan *Vereeniging van Spooren Tranwef Personel in Nederlandsch Indies* [VSTP] pada 1908. Kedua serikat pekerja ini secara tidak langsung pula memunculkan serikat buruh yang lain. Namun demikian kedua serikat tersebut memiliki perbedaan. Serikat pekerja *Staatpoorwegen Bond* ini secara kepengurusan dikendalikan oleh orang-orang kolonial belanda dan cenderung tidak militan, sementara itu serikat pekerja VSTP, yang tidak membedakan ras dan posisi buruh dalam perusahaan, berkembang dengan basis buruh yang luas dan militan terutama sejak 1913 dibawah kepemimpinan Semaoen dan Sneevliet.

Munculnya beragam serikat buruh tersebut memunculkan kepercayaan buruh untuk melakukan aksi pemogokan untuk menuntut hak upah dan persoalan jam kerja. Takashi Shiraisi menuliskan bahwa pada akhir 1910an dan awal 1920 digambarkan sebagai zaman pemogokan (*the age of strikes*), yang berkontribusi dan melatih rakyat untuk berorganisasi. Pada tahun tersebut aksi-aksi yang dipimpin oleh tokoh serikat buruh seperti Semaoen bukan hanya dipahami sebagai aksi untuk menuntut hak upah dan kondisi kerja, namun aksi tersebut dipahami oleh tokoh-tokoh serikat buruh sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjuangan melawan penjajah.¹ Dikatakan demikian, karena sebagian besar tokoh-

¹ Shiraisi, Takashi. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. New York: Cornell University Press, 1990, hlm. 147-158

tokoh serikat buruh juga, terutama serikat VSTP seperti Semaoen, menjadi bagian dari aktivitas politik dengan cara mendirikan organisasi politik misalnya berdirinya organisasi kiri Hindia Belanda pada 1914, *Indische Sociaal Democratische Vereniging* [ISDV]. ISDV ini pada 1920 merebut massa Sarekat Islam dan kemudian memunculkan Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh Semaoen dan Darsono serta sejumlah tokoh lain seperti Tan Malaka dan Musso. Namun demikian, paska gagalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] pada akhir 1926, maka dua partai politik pada 1927 yaitu Partai Sarekat Islam [PSI] dan Partai Nasional Indonesia [PNI] aktif membentuk serikat-serikat buruh guna membangun basis keanggotaannya.

Pada masa kemerdekaan, terutama di rezim Orde Lama, organisasi serikat buruh muncul kembali dalam panggung politik. Hadiz menyatakan bahwa pada 1950an dan awal 1960an terdapat sebagian besar serikat buruh berafiliasi, baik secara resmi maupun tidak resmi, dengan salah satu partai politik.² Misalnya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia [SOBSI] berafiliasi dengan PKI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia [Sarbumusi] dengan Nahdhatul Ulama, Serikat Buruh Islam Indonesia atau Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia [Gasbiindo] dengan Parmusi, dan Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia [SOBRI] dengan Murba. Pada era ini serikat buruh saling bersaing satu sama lain dan ini disebabkan oleh partai-partai politik yang menaunginya berkontestasi satu sama lain.

Pada masa transisi politik dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, gerakan buruh mengalami titik nadir gerakan sebagai salah satu kekuatan penting dalam konstelasi politik nasional. Efendi Siregar menyebutkan ada tiga fase gerakan buruh pada rezim ini. Pertama, fase 1966 sampai awal 1970-an sebagai fase pelarangan terhadap segala bentuk pengorganisasian Serikat Buruh [SB]. Kedua, fase 1970-1990 sebagai fase pengambilalihan (*take over*) seluruh kekuatan SB di bawah kendali militer. Ketiga, fase 1990-1998, fase

² Hadiz Vedi R. "Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik Indonesia." *Prisma*, 1998, hlm.77-79

kebijakan ekonomi pasar menjadi “kedok” pemerintah untuk melanjutkan proyek kooptasi dan eksploitasi atas kekuatan politik buruh melalui konsep Hubungan Industrial Pancasila.³

Runtuhnya rezim Orde Baru –muncul era reformasi– menjadi oase bagi kebangkitan gerakan buruh. Gerakan buruh relatif lebih bebas berserikat dan berorganisasi. Gerakan buruh mulai bermunculan, misalnya muncul-nya federasi serikat baru seperti salah satunya Serikat Pekerja Metal Indonesia [SPMI].

Di aras lain, runtuhnya rezim orde baru membangkitkan semangat kaum reformis, salah satu-nya kelompok buruh, untuk ikut andil dalam kontestasi pemilu melalui membangun partai politik. Pada Pemilu 1999 terdapat partai politik yang memiliki keterkaitan dengan kelompok buruh. Misalnya Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), Partai Rakyat Demokratik [PRD], dan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia [PSPSI]. Namun dari lima partai yang berkaitan dengan perjuangan kaum buruh ini, tidak ada satu pun yang berhasil memperoleh kursi di parlemen.

Begitu pula pada Pemilu 2004 tercatat dari 24 partai peserta pemilu hanya satu partai yang punya keterkaitan dengan kepentingan buruh yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat [PBSD]. Partai ini merupakan perubahan nama dari Partai Buruh Nasional pada pemilu 1999. Partai ini juga gagal memperoleh kursi di tingkat nasional. Selain PBSD, menurut Ford ada tiga partai buruh lainnya yang juga terdaftar di KPU pada pemilu 2004, akan tetapi ketiga partai tersebut tidak lolos dalam tahap akhir verifikasi. Adapun ketiga partai yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia [PPPI], Partai Kongres Pekerja Indonesia [PKPI], dan Partai Tenaga Kerja Indonesia [PTKI] tidak lolos dalam tahap akhir verifikasi di KPU.⁴

³ Effendi Siregar, Amir. “Buruh dan Politik”. *Jurnal Demokrasi*, 2011, hlm 7

⁴Ford, Michel. “Economic unionism and labour’s poor performance in Indonesia’s 1999 and 2004.” Makalah pada acara konferensi ke 19 oleh Association of Industrial Relations Academics of Australia and New Zealand (AIRAANZ), Sydney, 9-11 Februari 2005, hlm.201

Pada Pemilu 2009, tercatat satu partai⁵ yang mewakili suara buruh, yakni Partai Buruh. Akan tetapi, partai ini pula tidak berhasil memperoleh kursi di legislatif. Ditengarai ketidakberhasilan partai yang mewakili gerakan buruh ini disebabkan oleh fragmentasi gerakan buruh yang begitu luas, afiliasi, dan orientasi politik yang berbeda. Berikut data perolehan suara partai yang punya keterkaitan dengan buruh.

Tabel 1.

Perolehan Suara Partai yang Punya Keterkaitan dengan Buruh Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009

Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
PPI	63,934	PBSD	636,397	PB	265,203
PRD	78,730				
PSPI	61,105				
PBN	140,980				
PSP	49,807				
Total	394,556		636,397		265,203

Sumber : Data diakses melalui website www.kpu.go.id dan diolah oleh peneliti

Selain serikat buruh membangun partai politik, ada strategi lain dilakukan oleh sebagian serikat buruh untuk ikut berkontestasi dalam pemilu. Ada dua strategi, yaitu diaspora politik dan *engagement*. Pertama, diaspora politik merupakan strategi pencalonan aktivis buruh sebagai calon anggota legislatif [caleg] dengan partai yang sudah ada. Kedua, sementara strategi *engagement* dilakukan melalui kontrak politik serikat buruh dengan dengan caleg yang sudah disiapkan oleh partai politik tersendiri. Kedua strategi ini terlihat pada pemilu

⁵Sebenarnya pada pemilu 2009 terdapat dua partai yang dianggap mewakili kepentingan buruh yaitu Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia [PPPI]. Akan tetapi dalam tulisan ini, penulis tidak mencantumkan PPPI sebagai salah satu perwakilan buruh dikarenakan penulis menganggap PPPI merupakan bagian dari kepanjangan Pengusaha. Indikasinya adalah partai ini didirikan oleh seorang pengusaha yaitu Daniel Hutapea.

2004 dan 2009. Juliawan menjelaskan pada pemilu 2004 pemimpin Serikat Pekerja Nasional [SPN] mengambil keputusan untuk mencalonkan anggotanya sebagai caleg dari Partai Keadilan Sejahtera [PKS], bahkan pada pemilu 2009 SPN memutuskan untuk menyalurkan suara anggotanya ke PKS.⁶

Begitu pula yang terjadi pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia [FSPMI] pada pemilu 2009, hampir sebagian pimpinan dan anggota serikat-nya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Sebut saja misalnya Said Iqbal, yang merupakan Presiden FSPMI, mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari PKS di daerah pemilihan Kepulauan Riau dan akhirnya tidak terpilih. Ditengarai kegagalan para aktivis buruh ini disebabkan oleh kuatnya oligarki politik, korupsi pemilu⁷, maju secara individual bukan atas nama perwakilan serikat pekerja, dan tidak didukung oleh serikat buruh yang lebih luas.

Meskipun demikian aktivis buruh gagal terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009, akan tetapi pada 2009 hingga awal 2014 mobilisasi gerakan buruh di beberapa tempat semakin menguat dan ini disebabkan oleh adanya tuntutan akan sistem jaminan sosial oleh gerakan buruh secara masif, peristiwa penolakan Upah Minium Kab. Bekasi dengan memblokade jalan tol Jakarta-Cikampek 2012, dan peristiwa *Grebek Pabrik*⁸ pada Mei hingga Oktober 2012.

⁶ Juliawan, Benny Hari. "Challenging The elite: Labour's electoral experiments In Democratic Indonesia." Dalam *Worker Activism After Reformasi 1998*, oleh Jafar Suryomenggolo (Ed), 46-86. Hongkong: Asia Monitor Resource Center. 2014

⁷Anatomi Korupsi Pemilu meliputi jual beli suara, pembelian pencalonan, sumbangan dana kampanye ilegal, dan manipulasi penghitungan suara. Lihat dalam Djani,Luky. "Demokrasi Prabayar." *Jurnal Analisis CSIS*, 2012, hlm.68

⁸ Secara garis besar setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa ini. *Pertama*, para buruh yang bekerja di perusahaan tidak memiliki kepastian kerja. Artinya para buruh bekerja hanya sebagai buruh harian lepas dan borongan. *Kedua*, para buruh yang berkeinginan untuk bekerja di perusahaan harus melalui pihak ketiga dan diharuskan membayar, istilah ini disebut sebagai sistem kerja *outsourcing*. Untuk lebih jelasnya tentang Gerakan *Grebek Pabrik* di Kabupaten Bekasi. Lihat dalam Mufakhir, Abu. "Grebek Pabrik in Bekasi: Research Note on Unions." Dalam *Worker Activism after Reformasi 1998*, oleh Jafar Suryomenggolo (Ed),119-140. Hongkong: Asia Monitor Resource Center Publishing. 2014

Walaupun gerakan buruh semakin menguat sebagaimana narasi di atas, akan tetapi gagasan untuk membangun partai yang mewakili kaum buruh dan ikut berkontestasi pada pemilu 2014 belum terwujud. Tidak adanya partai politik pada pemilu 2014, yang dibangun oleh gerakan buruh, memunculkan inisiatif bagi serikat pekerja di Indonesia untuk tetap ikut terlibat dalam kontestasi Pemilu 2014, salah satunya FSPMI. Secara organisasional, FSPMI mengambil pilihan untuk ikut dalam kontestasi Pemilu 2014 dengan mencalonkan para anggotanya sebagai caleg di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional dengan strategi diapora politik.

Pada Pileg 2014, FSPMI mengintruksikan secara organisasional kepada seluruh anggota serikat pekerja untuk mendukung calon yang direkomendasikan oleh FSPMI. Berdasarkan data FSPMI⁹, ada 35 caleg yang direkomendasikan untuk berkontestasi pada Pileg 2014. Caleg ini, yang direkomendasikan oleh FSPMI, tersebar di sepuluh wilayah. Dari 35 calon tersebut hanya dua caleg yang terpilih, Nyumarno dari PDIP dan Nurdin dari PAN sebagai DPRD Kab Bekasi.

Tulisan ini berbeda dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya tentang gerakan buruh ikut dalam kontestasi dalam pemilu. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Savirani¹⁰ tentang buruh *go politics* pada pemilu 2014 di Bekasi yang dikaitkan dengan argumentasi patronase dalam politik elektoral. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa upaya buruh *go politics* tanpa politik uang memberikan satu gambaran bahwa politik di Indonesia tidak selalu soal patronase, politik uang, dan hanya dapat dimasuki kelompok elite saja. Namun demikian, politik di Indonesia berkaitan pula pada soal kekuatan pengorganisasian dan mobilisasi di tingkat basis. Sebagai contohnya, terpilihnya dua calon anggota DPRD Kab. Bekasi, yang merupakan duta politik dari FSPMI, menjadi bukti bahwa dukungan serikat buruh secara penuh berkontribusi untuk memenangkan dan terpilihnya calon tersebut.

⁹ www.FSPMI.or.id. Diakses 12 Desember 2015, dari <http://fspmi.or.id/tag/caleg-buruh>.

¹⁰ Savirani, A. "Bekasi, Jawa Barat: Buruh *Go Politics* dan Melemahnya Politik Patronase." Dalam *Politik Uang di Indonesia*, oleh Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (Ed), 247 -271. Yogyakarta: Penerbit PolGov. 2015

Berangkat dari narasi di atas, tulisan ini akan menelaah lebih dalam model representasi politik pada dua anggota FSPMI –Nyumarno dan Nurdin Muhidin–, yang telah melakukan eksperimentasi politik pada Pemilu 2014 dan berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] di Kab. Bekasi. Apakah model representasi yang dibangun oleh kedua anggota DPRD tersebut merupakan representasi simbolik, deskriptif, atau bahkan substantif?

Untuk menjawab model representasi yang terjadi pada dua anggota DPRD ini, maka tulisan ini akan fokus pada: Pertama, hubungan timbal balik antara duta politik –dalam studi kasus ini yaitu Nyumarno dan Nurdin– dengan FSPMI. Hal penting yang akan ditelaah pada bagian ini adalah sejauhmana dukungan organisasi buruh umumnya dan FSPMI khususnya berkontribusi pada keterpilihan kedua orang tersebut menjadi anggota DPRD. Kedua, memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada penguatan representasi dan interaksi politik antara duta politik dan *core constiuen* terutama FSPMI. Dalam penelitian ini, kedua hal tersebut ditelaah pada tiga fase. Fase pertama disebut fase pra elektoral, kedua fase elektoral, dan terakhir disebut sebagai fase paska elektoral. Lebih dari itu, artikel ini tidak hanya mengobservasi aktor semata –duta politik dan *core constiuen* terutama FSPMI– akan tetapi akan melihat pula struktur sosial, ekonomi, politik di daerah studi kasus ini.

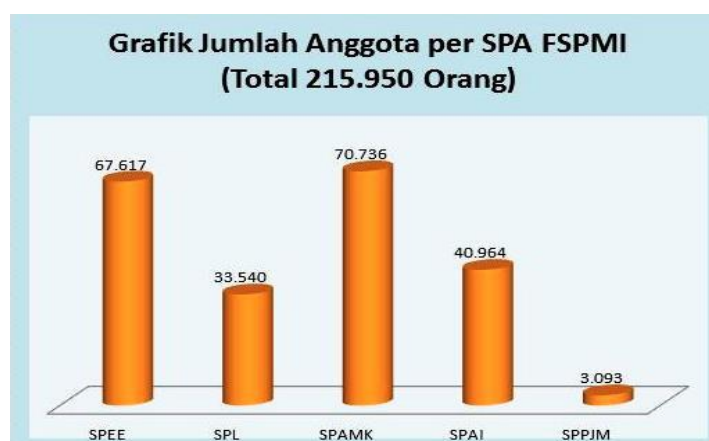
Tulisan ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama berisi tentang kemunculan buruh FSPMI *go politics*. Dalam bagian ini berisi tentang (1) proses penentuan calon diantaranya terkait persepsi, kepentingan, dan harapan *core constiuen*, dan (2) relasi dan interaksi antara serikat, duta politik, dengan partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan strategi pemenangan relawan Buruh Go Politik [BGP] terkait mesin politik, model kampanye, biaya politik, hingga karakter pemilih dan persebaran data konstituen dari dua orang caleg terpilih, Nyumarno dan Nurdin Muhidin. Sebagai penutup dalam tulisan ini, pada bagian akhir tulisan ini berisi kesimpulan yang menjawab dan menjelaskan tentang model representasi yang dibangun dan memberikan kritik serta tawaran terhadap model representasi yang terjadi.

B. *Go Politics* dan Proses Penentuan Calon

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia [FSPMI] merupakan salah satu federasi serikat buruh terbesar di Indonesia. Awalnya bentuk organisasi FSPMI merupakan unitaris, yang pada waktu berdirinya pada 6 Februari 1999 bernama Serikat Pekerja Metal Indonesia [SPMI]. Pada Kongres II SPMI, 28 Agustus-1 September, di Lembang, Bandung, berubah bentuk organisasi dari unitaris SPMI menjadi federasi.

Secara struktural, organisasi FSPMI mempunyai enam serikat pekerja anggota antara lain; Serikat Pekerja Elektronik Elektrik [SPEE], Serikat Pekerja Automotif, Mesin, dan Komponen [SP AMK], Serikat Pekerja Logam [SP Logam], Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim [SP PJM], Serikat Pekerja Dirgantara [SP Dirgantara], dan Serikat Pekerja Aneka Industri [SP AI]. Tercatat sejak february 2014 wilayah kerja FSPMI berada di 12 Provinsi; Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dari 12 Provinsi tersebut, FSPMI terdapat di 50 Kabupaten atau Kota. Secara keseluruhan anggota FSPMI sejumlah 215.950 anggota yang tersebar di 1.031 Pengurus Unit Kerja [PUK] tingkat pabrik, sebagaimana dalam bentuk Grafik 1 berikut ini;

Grafik 1¹¹ Jumlah Anggota Serikat Pekerja FSPMI



Catatan: Data ini belum termasuk anggota SP AMK, SPL, dan SPEE di DKI Jakarta

Sumber: Data laporan tahunan FSPMI

¹¹www.fspmi.or.id. Dikases pada 19 Oktober 2015, dari <http://fspmi.or.id/membaca-angka-perkembangan-anggota.html>.

Pada Pemilu Legislatif [Pileg] 2014, FSPMI mengintruksikan secara organisasional kepada seluruh anggota serikat pekerja untuk mendukung calon anggota legislatif [Caleg] yang direkomendasikan oleh FSPMI. Terdapat 35 calon anggota legislatif yang direkomendasikan untuk maju pada Pileg 2014 dan hanya dua calon anggota legislatif yang terpilih, yaitu Nurdin dan Nyumarno yang merupakan perwakilan dari FSPMI Kab. Bekasi dan terpilih anggota DPRD Kab. Bekasi.

Awalnya gerakan buruh di FSPMI di Kab. Bekasi hanya fokus mengadvokasi isu hubungan industrial misalnya soal upah, isi perjanjian kerja bersama, dan tunjangan. Namun pada akhir 2012, ada kesadaran baru dari elite FSPMI bahwa kehidupan buruh tidak hanya sebatas hubungan industrial, akan tetapi buruh sebagai warga negara juga berhak atas kesehatan, pendidikan, dan hak lainnya. Untuk mewujudkan hak tersebut, maka penting gerakan buruh *go politics*.¹² Lebih dari itu, kelompok buruh merasakan isu perburuhan seperti soal hak upah, Keselamatan Kesehatan Kerja [K3], dan jaminan sosial, sudah dapat dipenuhi melalui mekanisme tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja. Sementara itu, untuk isu kesejahteraan sosial atau proteksi sosial lainnya tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme tripartit. Dengan menggunakan kerangka berpikir Andersen, maka keterbatasan mekanisme tripartit tersebut mengharuskan kelompok buruh keluar dari pabriknya dan membangun aliansi dengan kelompok lain untuk mendorong isu jaminan sosial non perburuhan seperti hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan hak lainnya.¹³ Untuk mewujudkan jaminan sosial non perburuhan tersebut, maka arena pembahasan tersebut berada di level legislatif dan eksekutif. Karena arena tersebut salah satunya di legislatif, maka mengharuskan kelompok buruh untuk berkontestasi melalui

¹² Kesadaran *Go Politics* terbangun ketika elite di FSPMI Kab. Bekasi berkunjung dan belajar pada gerakan tani di Omah Tani¹², Kab. Batang. Omah Tani merupakan salah satu komunitas di Kab. Batang yang konsen pada isu-isu hak-hak tani dan aktif mengorganisir serikat tani. Komunitas ini didirikan oleh Handoko

¹³ Esping-Anderson, G. *Three Worlds of Welfare State Capitalism*. New Jersey: Princeton University Press. 1990, hlm. 71-113.

politik elektoral, yang pada akhirnya kelompok buruh tersebut dapat ikut terlibat secara aktif membahas isu-isu jaminan sosial non perburuhan.

Temuan tersebut selaras dengan hasil survey ahli Power, Welfare, dan Democracy Universitas Gajah Mada bahwa ada kecenderungan atau trend dimana publik meminta negara lebih aktif dalam memberikan jaminan sosial atau kesejahteraan sosial.¹⁴ Dengan kondisi buruh, yang hanya mengandalkan upah minimum dan jaminan kerja, maka belum mampu memenuhi kebutuhan jaminan sosial non perburuhan mereka seperti hak sehat, hak pendidikan, hak bertempat tinggal. Oleh karena itu, agar keluarga mereka terpenuhi haknya, maka mereka harus memperjuangkan isu non perburuhan terutama terkait kesejahteraan sosial melalui mekanisme politik dan itu harus diawali dengan cara ikut dalam politik elektoral.

Berangkat dari argumentasi tersebut, para elit di FSPMI melakukan refleksi tentang penting-nya untuk memperjuangkan hak-hak lain selain isu perburuhan. Akhirnya elite FSPMI di Kab. Bekasi menyusun langkah strategis untuk memenuhi hak lain tersebut. Langkah strategis ini yang disebut “Buruh *Go Politics* [BGP]”. Awalnya gerakan buruh *go politics* ini diinisiasi oleh pengurus Konsulat Cabang [KC] FSPMI Kab. Bekasi, selanjutnya elite KC FSPMI Kab. Bekasi mengusulkan inisiatif tersebut ke DPP FSPMI dan DPP FSPMI menyetujui inisiatif tersebut¹⁵.

Ada dua pandangan di internal FSPMI terkait inisiatif buruh *go politics*. Kelompok elite pertama melihat inisiatif buruh *go politics* penting untuk dilakukan dengan cara membangun partai alternatif. Alasannya, karena partai yang sudah ada dianggap korup dan merupakan bagian dari kaum borjuasi. Sementara kelompok elite yang lain pula melihat bahwa inisiatif *go politics* ini dapat dilakukan dengan cara diaspora politik yaitu, mencalonkan anggota FSPMI melalui partai yang sudah ada. Pandangan kedua ini muncul

¹⁴ Savirani, A dkk. *Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme*. Ringkasan Eksekutif, Yogyakarta: PWD UGM Press, 2013, hlm. 1-27

¹⁵ Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan Aji, Ketua KC FSPMI. Kab. Bekasi pada 15 Mei 2015, di Kantor KC FSPMI. Kab. Bekasi.

dengan argumentasi bahwa untuk membentuk partai alternatif itu sangat tidak mungkin dilakukan apabila akan ikut berkontestasi pada Pemilu 2014.

Berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan elite di FSPMI, akhirnya diputuskan untuk mengambil pandangan kelompok kedua. Adapun dalih untuk mengambil cara kedua sebagaimana yang dikatakan oleh Obon Tabroni bahwa jangan sampai kita tidak mendapatkan sesuatu yang besar, misalnya membuat partai politik, dan sesuatu yang kecil pula ditinggalkan, seperti merebut kursi di DPRD Kab. Bekasi.¹⁶

Alasan yang disampaikan oleh Obon ini tentu dapat dikatakan sebagai alasan pragmatisme politik bagi sebagian kelompok aktivis gerakan, tetapi telaah dari kondisi pada waktu itu seperti persyaratan membentuk partai politik yang sulit dan ditambah pula dengan durasi waktu pemilu 2014 semakin dekat, tentu alasan ini menjadi realistis dan masuk akal untuk diambil. Disepakatinya keputusan ini secara implisit pula akan menguji soliditas anggota FSPMI Kab. Bekasi.

Berdasarkan narasi proses pengambilan keputusan inisiatif buruh *go politics* tersebut, dapat digambarkan bahwa inisiatif buruh *go politics* bukan berangkat dari sebuah kesadaran politik yang berangkat dari arus bawah anggota FSPMI. Kesadaran pentingnya buruh *go politics* berangkat dari satu kesepakatan elite FSPMI Kab. Bekasi, yang kemudian diinformasikan oleh pengurus DPP FSPMI melalui surat sedaran kepada semua anggota FSPMI.

Pada momentum Pemilu Legislatif [Pileg], FSPMI Kab. Bekasi memutuskan untuk mengusulkan kadernya maju sebagai calon legislatif di DPRD Kab. Bekasi. Dalam proses penentuan calon, ada dua pandangan yang muncul di internal FSPMI untuk menyeleksi anggota yang akan diusulkan sebagai calon anggota legislatif. Langkah pertama dengan melakukan pemilu raya di internal FSPMI Kab. Bekasi. Artinya, semua anggota FSPMI akan dikumpulkan dan setiap orang boleh dicalonkan dan mencalonkan dan seluruh anggota

¹⁶ Dokumen wawancara penulis artikel ini dengan Vice Presiden FSPMI dan mantan ketua KC FSPMI Kab. Bekasi, Obon Tabroni, 15 Mei 2015, di Kantor KC FSPMI. Kab. Bekasi

akan memilihnya. Dengan hasil pertimbangan elite di KC. dan PC. FSPMI dan perwakilan dari DPP. FSPMI, konsep pemilu raya ini tidak dipilih dengan dalih untuk menghindari potensi konflik di internal FSPMI.

Selain itu ada beberapa alasan lain tidak dipilihnya konsep pemilu raya, sebagaimana dikatakan oleh Obon Tabroni.¹⁷ Pertama, individu atau anggota FSPMI yang memiliki kualitas pengetahuan yang baik, tetapi tidak populer dimata anggota FSPMI karena tidak pernah muncul di panggung orasi ketika aksi, maka tidak menutup kemungkinan tidak terpilih di pemilu raya. Kedua, anggota FSPMI yang tidak punya pengurus unit kerja [PUK]¹⁸ seperti Nyumarno, atau memiliki PUK dengan anggota sedikit, maka dapat dipastikan tidak akan menang dalam konsep pemilu raya. Dikatakan demikian, karena PUK dengan jumlah anggotanya yang sangat besar, sangat kecil kemungkinan akan mendukung calon yang berasal dari pengurus PUK dengan jumlah anggota kecil, apalagi mendukung calon yang tidak memiliki PUK. Berdasarkan pertimbangan ini, akhirnya konsep pemilu raya tidak dijadikan pilihan dalam proses menentukan calon anggota legislatif yang akan diusulkan oleh FSPMI.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka cara penentuan caleg yang akan diusulkan oleh FSPMI Kab. Bekasi melalui mekanisme hasil rapat terbatas di antara elite FSPMI. Rapat terbatas ini dihadiri oleh Perwakilan DPP. FSPMI, Ketua KC. FSPMI Kab.Bekasi, dan para pimpinan yang berada dibawah KC. FSPMI Kab. Bekasi, PC. Automotif Mesin dan Komponen, PC. Elektrik Elektronik, PC. Logam, dan PP. Aneka Industri. Dalam rapat terbatas ini, semua pimpinan bersepakat agar setiap pengurus cabang KC FSPMI Kab. Bekasi mengusulkan individu yang akan dicalonkan sebagai caleg.

¹⁷ Dokumen wawancara penulis artikel ini dengan Vice Presiden FSPMI dan Mantan Ketua KC FSPMI Kab. Bekasi, Obon Tabroni, 15 Mei 2015, di Kantor KC. FSPMI. Kab. Bekasi.

¹⁸ Penggurus Unit Kerja [PUK] merupakan satuan struktur organisasi paling bawah di setiap serikat pekerja. PUK ini secara struktural FSPMI berada di level pabrik. Jadi setiap pabrik yang ada anggota FSPMI, dapat dipastikan ada PUK-nya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Aji bahwa pada proses penyaringan ada sekitar 15 orang yang diusulkan oleh seluruh PC. dan akan disaring untuk jadi caleg. Pada proses penyaringan, ada kesepakatan bahwa setiap dapil harus ada satu caleg dari FSPMI. Adapun pertimbangan setiap dapil satu orang caleg ini berangkat dari hasil refleksi kegagalan kader FSPMI yang mencalonkan sebagai anggota legislatif di Batam pada 2009. Adapun hasil refleksi kegagalan caleg perwakilan FSPMI di Batam pada pemilu 2009 sebagai berikut: Pertama, walaupun anggota FSPMI yang mencalonkan di Batam sebagai anggota legislatif telah direkomendasikan secara organisasional oleh FSPMI, akan tetapi fakta di lapangan para calon bergerak sendiri. Kedua, terdapat lebih dari satu caleg dari FSPMI di setiap dapil, dari 2 hingga 3 orang caleg dari FSPMI.¹⁹

Berangkat dari refleksi pengalaman dan kegagalan yang pernah terjadi, maka pada rapat terbatas di antara elit FSMPI tersebut diputuskan bahwa: 1) calon yang direkomendasikan oleh elite KC. FSMPI dilihat dari pengetahuan tentang isu perburuhan dan rekam jejak-nya. 2) Awalnya hanya dua daerah pemilihan yang akan diisi oleh caleg perwakilan FSPMI yaitu dapil I dan II. Keputusan ini diambil mengingat basis buruh FSPMI yang kuat hanya ada di dua daerah pemilihan tersebut, tetapi berdasarkan masukan dan rapat-rapat terbatas di elite FSPMI, akhirnya dikembangkan untuk mengisi wakil FSPMI sebagai caleg di dapil III, V²⁰, dan VI.

¹⁹ Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan Ketua KC FSPMI. Kab. Bekasi, Aji, 15 Mei 2015, di Kantor KC FSPMI. Kab. Bekasi.

²⁰ Awalnya caleg tersebut mencalonkan sendiri dan tidak dapat rekomendasi dari KC FSPMI. Kab. Bekasi, karena di dapil V tersebut tidak ada caleg yang direkomendasikan oleh FSPMI, maka pihak elite FSPMI kemudian berinisiatif untuk mengakomodir dan merekomendasikan calon dari FSPMI tersebut yang berangkat atas inisiatif sendiri.

C. Calon dari FSPMI Kab. Bekasi dan Kendaraan Politik

Paska ditetapkan caleg Kab. Bekasi yang akan diusulkan oleh FSPMI, hal pertama yang dilakukan oleh perwakilan FSPMI –dalam hal ini Obon Tabroni sebagai ketua KC. FSPMI– mendatangi PC. PDIP. Pilihan Obon untuk mendatangi PDIP karena adanya kedekatan antara Obon dan Rieke Diah Pitaloka. Kedekatan ini terjadi pada Pilgub Jawa Barat 2013 ketika Rieke Diah Pitaloka mencalonkan sebagai Cagub Jabar bersama Teten Masduki sebagai Wagubnya, sementara Obon merupakan sebagai salah satu tim suksesnya untuk basis pemilih buruh di Bekasi. Dalam proses negosiasi dengan PDIP Kab. Bekasi tersebut, FSPMI Kab. Bekasi diberikan jatah dua kursi calon anggota legislatif di Kab. Bekasi. Namun di tengah perjalanan sebelum masa kampanye Pileg, PDIP Kab. Bekasi meminta mahar politik secara khusus senilai 10 juta untuk satu kursi saja. Permintaan ini dengan tegas ditolak oleh FSPMI. Akhirnya, dari proses negosiasi hanya satu jatah yang tidak dipersyaratkan membayar mahar dan jatah ini diberikan kepada Nyumarno.

Dipilihnya Nyumarno oleh pengurus FSPMI Kab. Bekasi untuk mendapatkan satu jatah caleg perwakilan FSPMI dengan menggunakan kendaraan PDIP tersebut, karena Nyumarno punya kedekatan baik secara pribadi dengan Rieke Diah Pitaloka ketika proses Pilgub Jabar dan merupakan salah satu tim sukses Rieke-Teten untuk daerah pemilihan Kab. Bekasi. Ditambah pula dengan argumentasi bahwa Nyumarno pernah sebagai salah satu staf ahli Rieke Diah Pitaloka di saat Rieke menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Paska berkomunikasi dengan PDIP, hanya ada dua partai yang dapat diajak bertemu dan berkomunikasi oleh pengurus KC. FSPMI Kab Bekasi yaitu, PAN dan PKPI, sementara partai yang lain tidak dapat diajak untuk bertemu. Kedua partai ini dapat diajak untuk bertemu karena pimpinan PAN merupakan teman satu sekolah dengan Obon Tabroni, sementara dengan PKPI karena partai ini merupakan partai baru dan butuh basis suara yang banyak. Akhirnya disepakati dalam proses pertemuan terpisah dengan kedua pimpinan partai ini, PAN Kab. Bekasi dan PKPI Kab. Bekasi memberikan dua jatah caleg dari perwakilan FSPMI.

Dalam proses pencarian kendaraan partai politik, tidak ada negosiasi mahar atau transaksi uang antara calon yang direkomendasikan oleh FSPMI Kab. Bekasi dengan partai politik yang dijadikan kendaraannya. Partai politik sedari awal melihat ada potensi suara besar yang berada di FSPMI Kab. Bekasi dengan basis anggota kurang lebih 83.000, sebaliknya FSPMI Kab. Bekasi membutuhkan kendaraan politik untuk mencalonkan kadernya sebagai caleg. Relasi dan interaksi politik yang saling membutuhkan ini ditengarai sebagai salah satu faktor FSPMI Kab. Bekasi mendapatkan jatah caleg di partai politik, bahkan menurut Obon Tabroni, partai politik yang ada hanya sebagai kendaraan politik belaka dan duta politik yang dicalonkan sebagai caleg oleh FSPMI Kab. Bekasi lebih banyak berinteraksi dengan anggota dan pengurus KC FSPMI Kab. Bekasi dari soal strategi kemenangan, isi kampanye, hingga biaya politik.²¹

Paska penentuan kendaraan politik telah dilakukan, proses selanjutnya adalah menetapkan daerah pemilihan caleg yang direkomendasi FSPMI Kab. Bekasi. Penetapan caleg ini ditentukan berdasarkan daerah tempat tinggal masing-masing calon yang direkomendasikan FSPMI. Dipilihnya cara penetapan dapil ini karena dianggap paling memungkinkan dan mempermudah bagi caleg yang direkomendasikan oleh FSPMI Kab. Bekasi untuk bersosialisasi dan berkampanye dengan warga sekitar di daerah tempat tinggalnya. Namun pada proses penentuan calon khusus di daerah dapil I, ada persoalan baru yang dihadapi oleh FSPMI Bekasi yaitu tentang adanya dua calon –Nyumarno dan Nurdin Mudihin–, yang bertempat tinggal di dapil yang sama. Akhirnya diputuskan oleh elite FSPMI di rapat terbatas bahwa Nurdin Muhidin di Dapil I dan Nyumarno di Dapil VI. Ditetapkannya Nyumarno untuk menduduki dapil VI karena di daerah tersebut terdapat keluarga besar istri Nyumarno dan ayah dari istri Nyumarno merupakan salah satu tokoh di salah satu daerah pemilihan tersebut. Selain itu, Nyumarno pula dianggap mempunyai

²¹ Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan Obon Tabroni, 15 Mei 2015, di Kantor FSPMI Kab. Bekasi.

kemampuan pengalaman politik yang lebih baik daripada Nurdin Muhidin, karena Nyumarno pernah bekerja sebagai salah satu staf ahli Rieke Diah Pitaloka di DPR RI.²² Berikut data lima anggota serikat pekerja FSPMI Kab. Bekasi yang dicalonkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Bekasi sebagaimana dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Data Nama Caleg , Kendaraan Politik, Daerah Pemilihan [Dapil], dan Perolehan Suara

No.	Nama Caleg	Kendaraan Politik	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara
1	Nurdin Muhidin	PAN	Dapil I	10.891
2	Suparno	PKPI	Dapil II	5.600
3	Aji	PAN	Dapil I	2.200
4	Susanto	PKPI	Dapil V	2.700
5	Nyumarno	PDIP	Dapil VI	6.092
Total				27.483

Sumber: Data diperoleh dari berbagai informan dan diolah oleh peneliti.

Berdasarkan data tabel 1 di atas, dari lima orang yang direkomendasikan oleh FSPMI Kab. Bekasi sebagai caleg DPRD di Kabuptaen Bekasi, hanya terdapat dua orang yang yang terpilih sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi yaitu; Nyumarno dan Nurdin Muhidin. Tidak terpilihnya tiga calon FSPMI sebagai anggota legislatif disebabkan oleh tiga hal. Pertama, daerah pemilihan caleg bukan basis pemukiman buruh, lebih banyak petani dan nelayan. Kedua, partai politik yang mengusung merupakan partai baru dan tidak punya basis suara pada pemilu sebelumnya.

Sementara itu, terpilihnya dua caleg dari FSPMI lainnya disebabkan. Pertama, daerah pemilihan caleg tersebut merupakan basis pemukiman buruh. Kedua, karena adanya

²² Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan salah satu informan, 20 Mei 2015, di salah satu perumahan Relawan Buruh Go Politik.

dukungan dari mertua caleg yang merupakan keluarga besar, penduduk asli Kab. Bekasi dan salah satu tokoh terpandang di salah satu desa daerah pemilihannya. Berikut tabel faktor penyebab tentang terpilih-nya dan tidak terpilih-nya calon anggota DPRD Kab. Bekasi yang direkomendasikan oleh FSPMI pada pemilu legislatif 2014.

Tabel 2.

Analisis faktor penyebab terpilih dan tidak-nya caleg DPRD Kab. Bekasi yang direkomendasikan oleh FSPMI pada Pileg 2014

No	Nama	Kendaraan Politik	Dapil	Terpilih/Tidak	Faktor
1	Nurdin Muhidin	PAN	I	Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah pemilihan ini merupakan basis buruh, terutama basis anggota FSPMI. - Nurdin mempunyai Pengurus Unit Kerja [PUK] yang basis sumbangannya sangat besar terhadap Nurdin.
2	Susanto	PKPI	V	Tidak terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah ini bukan basis buruh, sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan dan petani. - Partai pengusung merupakan partai baru, yang secara politik pula belum mempunyai basis pemilih.
3	Suparno	PKPI	II	Tidak Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Dapil ini merupakan basis buruh, akan tetapi partai politik pengusung PKPI yang merupakan partai baru dalam kontestan pemilu 2014 dan belum memiliki basis pemilih.
4	Aji	PAN	III	Tidak Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah pemilihan bukan basis buruh.

5.	Nyumarno	PDIP	VI	Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah ini sebenarnya basis buruh, akan tetapi anggota FSPMI tidak banyak. - Tim relawan buruh <i>go politics</i> di dapil ini ini berasal dari berbagai PUK, dari EE, AMK, AI, dan Logam. - Komunikasi Nyumarno dengan individu-individu di serikat lain cukup baik. - Di salah satu desa daerah pemilihan Nyumarno, terdapat keluarga besar mertua Nyumarno, yaitu desa Jatireja. Mertua Nyumarno ini merupakan salah satu tokoh pribumi yang dipandang di desa tersebut. - Pada proses-proses kampanye pileg, Nyumarno hampir selalu berkampanye secara bersama dengan Rieke Diah Pitaloka, yang pada waktu pileg pula mencalonkan sebagai caleg DPRI dari dapil Kab. Bekasi dan berangkat dari partai yang sama.
----	----------	------	----	----------	--

Sumber : Data diperoleh dari berbagai informan dan diolah oleh peneliti.

D. Strategi Pemenangan Dua Caleg Terpilih dari FSPMI.

1. Nyumarno dan Relawan Buruh Go Politik [BGP] Dapil VI

Secara garis besar Nyumarno merupakan lulusan SD, SMP, dan STM di Madiun. Nyumarno ikut aktif terlibat di FSPMI pada 2005. Pada 2008, Nyumarno melakukan mogok bersama dengan teman-temannya di PT Kymco untuk meminta haknya yaitu gaji yang belum dibayar dan uang pesangon. Gerakan ini berhasil memenangkan gugatan di PN Niaga Pusat 12 Mei 2010 dengan mempailitkan PT Kymco. Praktis pada proses melakukan gerakan ini, Nyumarno sendiri tidak bekerja di pabrik disebabkan tempat dia bekerja, PT Kymco, bangkrut.

Secara keorganisasian, Nyumarno merupakan Ketua Bidang HAM dan Pembelaan di Pengurus Pusat Aneka Industri [PP AI] FSPMI. Nyumarno tidak mempunyai PUK, karena pabrik tempat dia bekerja bangkrut. Dalam rentang waktu 2011-2013 pertengahan, Nyumarno ikut Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI Fraksi PDIP, untuk menjadi tenaga ahlinya dibidang ketenagakerjaan.

Nyumarno mencalonkan sebagai DPRD Kab. Bekasi melalui rekomendasi Pengurus Pusat Aneka Industri [PP AI] FSPMI, yang ketua umumnya adalah Obon Tabroni. Paska mendapatkan rekomendasi dari PP AI FSPMI, Nyumarno kemudian masukan sebagai salah satu daftar nama caleg yang didukung oleh FSPMI Kab. Bekasi.

Awalnya dalam dokumen siaran pers DPP FSPMI, 4, Juli 2013, nama Nyumarno tidak tercantum dalam daftar calon yang didukung oleh FSPMI secara nasional. Setelah didesak oleh Relawan Buruh Go Politik di dapil Nyumarno, akhirnya nama Nyumarno muncul dalam dokumen siaran pers DPP FSPMI.²³ Nyumarno mencalonkan sebagai caleg dari PDIP

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, tidak munculnya nama Nyumarno sebagai caleg dalam dokumen siaran pers di DPP FSPMI ditengarai adanya gesekan politik ditingkat elite terkait kedekatan Nyumarno dengan Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan kader PDIP dan kendaraan yang digunakan Nyumarno

di daerah dapil pemilihan VI yang terdiri atas tiga kecamatan: Kecamatan Cikarang Timur, Cikarang Utara, dan Karang Bahagia. Dari sisi pemilih daerah ini merupakan bukan basis buruh FSPMI, akan tetapi di salah satu daerah ini terdapat salah satu tempat keluarga besar istri Nyumarno.

Paska ditunjukannya Nyumarno sebagai caleg dari FSPMI di daerah pemilihan VI dan adanya intruksi dari pimpinan DPP FSPMI, maka anggota FSPMI yang berada di daerah dapil VI segera melakukan konsolidasi untuk mendukung proses pemenangan Nyumarno. Gerakan ini kemudian disebut sebagai Relawan Buruh Go Poltik [BGP] dapil VI. Sebagian besar relawan BGP dapil VI ini merupakan anggota FSPMI. Walaupun ada beberapa individu dari masyarakat atau anggota dari serikat lain secara individual ikut membantu, misalnya mertua Nyumarno –Suryana yang merupakan aktivis Satgas LSM NKRI–, Adi –Ketua Ormas Pejuang Siliwangi–, Kholidi yang merupakan aktivis KSN, dan Wardoyo dari Kasbi. Sistem kerja relawan ini dikoordinasikan oleh seorang pimpinan dapil VI, dan di setiap kecamatan, desa, dan hingga RT ditunjuk satu koordinator.

Strategi awal yang dilakukan oleh tim relawan BGP dapil VI adalah cara: Pertama, menguasai basis perumahan buruh dan di setiap perumahan tersebut ditunjuk satu orang yang dapat memberikan sosialisasi atau menciptakan forum untuk mensosialisasikan buruh *go politics*. Kedua, melakukan pendataan jumlah perumahan di dapil VI beserta jumlah anggota FSPMI di perumahan tersebut.

Jumlah anggota FSPMI di dapil VI hanya 2.500 jiwa. Data ini merupakan akumulasi total dari jumlah suara yang memunyai hak pilih maupun tidak. Dengan mempertimbangkan

adalah PDIP. Selain itu, sebagian anggota FSPMI di level *grass root* melihat pimpinan di DPP FSPMI ditengarai memunyai hubungan dekat, bahkan ada yang secara terbuka mengatakan sebagai kader PKS. Kondisi ini terlihat ketika aksi May Day, 1 Mei 2015, ada Hidayat Nur Wahid, elite PKS, yang diberikan panggung untuk berorasi di stadion GBK oleh KSPI, yang pimpinannya merupakan presiden DPP FSPMI. Peristiwa diundangnya Hidayat Nur Wahid sebagai salah satu orator dalam peringatan May Day di GBK, dianggap salah satu bukti kuat apabila sebagian elite di FSPMI memunyai kedekatan secara politik dengan Partai Keadilan Sejahtera.

data anggota FSPMI di Dapil VI tersebut, maka relawan buruh Go Politik [BGP] Dapil VI memunculkan inisiatif tiga strategi baru untuk mendapatkan suara yang lebih signifikan. Pertama, melakukan penyisiran terhadap anggota non FSPMI yaitu data buruh yang di luar FSPMI. Kedua, melakukan pendekatan dengan masyarakat umum silaturahmi dan menyosialisasikan tentang pentingnya menolak politik uang serta menjelaskan dampaknya. Ketiga, pendekatan keluarga besar mertua Nyumarno –Suryana– adalah orang pribumi di daerah pemilihannya, tepatnya di Desa Jatireja, Cikarang Timur.

Isu yang dibawa pada masa kampanye selain isu perburuhan, Nyumarno dan Relawan BGP Dapil VI juga fokus pada isu hak kesehatan dan pendidikan, dan isu yang lainnya. Sosialisasi kampanye bergantung komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Ketika proses masuk ke komunitas petani dan nelayan, isu yang dikampanyekan adalah soal hak kesehatan, pendidikan, harga pupuk dan solar. Pada proses kampanye pula, Nyumarno dan relawan BGP Dapil VI ini membuat forum kampanye dan sosialisasi BPJS yang melibatkan pula Rieke Diah Pitaloka, sebagai salah satu calon anggota DPR RI PDIP dari Dapil Kab. Bekasi. Forum-forum ini dilakukan oleh tim relawan BGP Dapil VI di daerah perumahan-perumahan basis buruh. Bahkan pada masa tenang, ada proses sosialisasi BPJS yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka dan ditemani oleh Nyumarno. Salah satu informan mengatakan pada proses sosialisasi ini disempatkan pula untuk berkampanye. Sebagaimana data dalam tabel berikut.

Tabel 3.
Data Sosialisasi dan Kampanye yang dilakukan Rieke Diah Pitaloka dan Nyumarno

Nama Kecamatan	Perumahan	Frekuensi Pertemuan
Kec. Karang Bahagia	Perum. Sukaraya, Desa Sukaraya.	Satu kali
	Perumahan Puri Cikarang Hijau, Desa Karang Asih	Satu kali
Kecamatan Cikarang Utara	Perumahan Grand City, Desa Karang Raharja	Tiga kali dengan tiga lokasi. Adapun di satu titik lokasi ini ditempatkan di rumah Kholidi yang

		merupakan salag anggota KSN, yang ikut secara individual untuk mendukung Nyumarno.
	Perumahan Central Park, Desa Karang Raharja.	Satu kali
	Perumahan Mutiara Indah, Desa Karang Raharja	Satu kali
	Perumahan Bumi Citra Lestri, Desa Waluya.	Tiga kali di tiga lokasi tempat berbeda.

Sumber : Data dari berbagai informan dan diolah peneliti

Proses kampanye bersama yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka dan Nyumarno ini menjadi unik karena Rieke secara organisasional bukan anggota FSMPI. Sementara anggota FSPMI yang dicalonkan secara organisasional oleh FSPMI sebagai Caleg dari dapil Kab. Bekasi yaitu Iswan Abdullah²⁴ dari Partai PKS. Ini menjadi salah satu bukti pula apabila afiliasi politik internal FSPMI sangat heterogen.

Data tentang kedekatan Nyumarno dengan Rieke dalam proses kampanye politik di atas tidak hanya persoalan sama-sama dari satu partai PDIP. Kedekatan ini harus dilihat secara jeli bahwa ada timbal balik yang saling menguntungkan yang akan diterima antara dua pasangan ini, Nyumarno sebagai Caleg DPRD Kab. Bekasi dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Caleg DPRD dari daerah pemilihan Kab. Bekasi. Timbal balik yang diharapkan satu sama lain antara lain basis suara, fasilitas pemenangan kampanye, dan jaringan politik.

Salah satu informan²⁵ mengatakan Rieke tentu tidak membutuhkan popularitas, akan tetapi dia membutuhkan basis dukungan suara yang terorganisir. Sementara Nyumarno sebagai caleg yang direkomendasikan dari FSPMI mempunyai basis dukungan dari buruh

²⁴ Iswan Abdullah merupakan salah satu petinggi di DPP FSPMI. Secara struktural dia menjabat sebagai Direktur Jamkeswatch KSPI. Saudara Iswan ini secara terbuka mengatakan dalam forum-forum terbatas di FSPMI sebagai salah satu kader PKS.

²⁵ Dokumen notulen pertemuan terbatas penulis artikel ini dengan dua informan, 28 Mei 2015, di salah satu perumahan dapil VI.

yang jelas, akan tetapi Nyumarno sendiri tidak punya dana politik yang begitu banyak karena dana politik yang ada hanya hasil saweran dari relawan BGP dapil VI. Oleh karena itu, Nyumarno membutuhkan fasilitas yang memadai untuk kampanye dan melakukan penghitungan suara misalnya seperti SMS Center dan tim data penghitungan suara, serta butuh legitimasi secara tidak langsung dari Rieke dalam proses kampanye bersama. Di titik ini terjadinya hubungan saling menguntungkan antara antara kepentingan Nyumarno dan Rieke Diah Pitaloka.

Berdasarkan data rekapitulasi relawan, perolehan suara Nyumarno sejumlah 6.070 . Data ini tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi dari KPU sejumlah 6.092 suara. Kantong-kantong suara Nyumarno lebih banyak di perumahan. Dari total suara 6.070 tersebut, persebaran suara paling banyak diperoleh Nyumarno di Kecamatan Cikarang Utara, tepatnya di daerah Desa Karang Raharja sejumlah 1.021 suara. Di desa ini merupakan basis buruh dan Relawan BGP dapil VI. Terutama di tiga perumahan di desa Karang Raharja yaitu; 1) Perumahan Grand City, 2) Perumahan Central Park, dan 3) Perumahan Puri Mutiara Indah. Selain itu pula, terdapat di Desa Waluyo Kec. Cikarang Utara sejumlah 931 suara.

Sementara di Kecamatan Cikarang Timur, suara Nyumarno terbesar di desa Jatireja sejumlah 919 suara. Di desa ini terdapat rumah dan keluarga besar mertua Nyumarno, Bapak Suwung. Selain itu pula, di desa Jatireja terdapat rumah tinggal buruh yaitu; 1) Perumahan Graha Asri, 2) Perumahan Kodam, 3) Perumahan Griya Jati Reja dan 4) Perumahan Permata Cikarang Timur. Untuk di Kecamatan Karang Bahagia, suara Nyumarno terbesar di desa Sukaraya sejumlah 469 suara. Di desa ini terdapat perumahan buruh yaitu 1) Perumahan Sukaraya, 2) Perumahan Puri Nirwana. Berikut data grafik perolehan suara Nyumarno berdasarkan data kecamatan.

Grafik 2.
Data Rekapitulasi Suara Nyumarno di Dapil VI



Sumber : Hasil Rekapitulasi Data KPU. Kab. Bekasi.

Adapun pemilih Nyumarno sebagian besar merupakan adalah anggota serikat pekerja FSPMI maupun non-FSPMI yang tinggal diperumahan. Walaupun ada penambahan dari suara yang berasal dari dukungan keluarga besarnya, akan tetapi hanya kecil. Artinya, karakteristik pemilih Nyumarno bersifat monolitik.

Dengan demikian, terpilihnya Nyumarno sebagai anggota DPRD dengan kendaraan PDIP disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, soliditas relawan BGP FSPMI di dapil VI. Soliditas ini dapat dilihat ketika proses sosialisasi dan masa kampanye, yang sebagian besar sumber daya dan dananya dikeluarkan oleh anggota FSPMI di dapil tersebut. Kedua, adanya Rieke sebagai salah satu tokoh nasional, yang juga mencalonkan sebagai calon anggota DPR RI dari PDIP di daerah pemilihan yang sama, secara tidak langsung memberikan kredit poin bagi Nyumarno bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh yang dianggap dapat legitimasi dari Rieke dan punya jaringan. Ketiga, salah satu daerah pemilihan yang dijadikan dapil bagi Nyumarno merupakan daerah keluarga besar istri dan mertuanya, yang merupakan salah satu tokoh dihormati di daerahnya.

2. Nurdin Muhidin dan Relawan Buruh Go Politik [BGP]

Nurdin secara pribadi merupakan putra kelahiran Kab. Karawang. Dia merupakan salah satu orator FSPMI. Dia cukup dikenal dikalangan FSPMI karena merupakan salah satu

orator nasional yang tahan berjam-jam di atas mobil komando [Mokom]. Sebagian besar anggota serikat pekerja FSPMI kerap menyebutnya sebagai *Nurdin Toa*. Dari sisi pengalaman organisasi, Nurdin pernah menjabat sebagai Ketua PUK FSPMI di PT Japan AE Power System Indonesia [JAEPSI]. Selain itu pula, Nurdin pernah aktif di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid di PT tersebut dan pernah pula menjabat sebagai Ketua Forum Kawasan Delta, EJIP, Hyundai pada 2008. Di tingkat Pengurus Cabang EE FSPMI, Nurdin pernah menjabat sebagai ketua IV bidang Organisasi dan Pendidikan dan pernah juga menjabat sebagai Ketua KC FSPMI Kab, Bekasi, akan tetapi hanya berjalan lima bulan, karena Nurdin terpilih sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi. Nurdin pula pernah menjabat sebagai dewan pengupahan dari perwakilan FSPMI selama dua kali.

Nurdin Muhidin mencalonkan sebagai caleg dengan kendaraan politik PAN di dapil 1 Kab. Bekasi. Dapil I terdiri atas enam kecamatan; Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Bojong Mangu, Kecamatan Cetu, Kecamatan Cibarusa, Kec. Cikarang Selatan, dan Kec. Cikarang Pusat. Dari sisi komposisi pemilih, dapil I berbeda dengan dapil VI. Dapil I merupakan daerah basis buruh dari anggota FSPMI, sementara dapil VI bukan merupakan daerah basis buruh dari FSPMI. Berdasarkan data KC FSPMI Kab. Bekasi pada 2014, tercatat anggota FSPMI di daerah dapil I ini sejumlah kurang lebih 25.000. Apabila ditotal semua dengan buruh di luar anggota FSPMI sebanyak kurang lebih 50.000. Dengan melihat data ini, relawan Buruh Go Politik [BGP] di dapil Nurdin lebih banyak melakukan strategi kampanye di daerah perumahan yang ada basis buruh-nya.

Pada proses elektoral komposisi relawan di daerah dapil ini berbeda dengan dapil VI. Apabila di dapil enam terdapat individu-individu di luar FSPMI yang ikut bergabung sebagai relawan Buruh Go Politik [BGP], sementara di dapil I tidak ditemukan anggota serikat lain ataupun individu yang ikut terlibat aktif sebagai relawan Buruh Go Politik [BGP] dalam mengawal kemenangan Nurdin. Semua relawan yang ada di dapil I merupakan anggota

FSPMI ataupun veteran²⁶ FSPMI. Adapun model kampanye yang dilakukan di dapil I dengan metode satu paket caleg dari buruh dengan partai pengusung yang berbeda. Paket ini disebut sebagai paket hebat buruh *go politics*. Seperti yang tertera dalam daftar gambar berikut.

Gambar 1. Paket Hebat Buruh Go Politik



Sumber : Data Relawan Buruh Go Politik Dapil 1

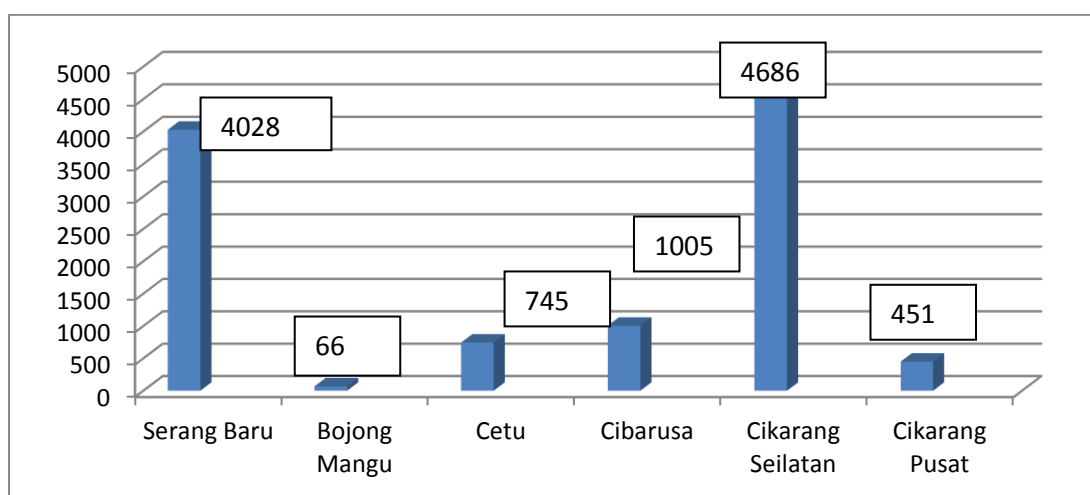
Model kampanye satu paket yang dilakukan oleh tim relawan BGP dapil I ini membuat fungsionaris pegurus cabang PAN di Kab. Bekasi kecewa. Kekecewaan ini muncul karena model satu paket yang dikeluarkan oleh tim relawan dari BGP dapil I menyebarkan selebaran yang berisi ajakan bagi publik luas untuk mendukung caleg dari partai selain PAN. Meskipun ada teguran dari PAN sebagai partai politik pengusung Nurdin, akan tetapi tim relawan BGP dapil I tetap melakukan kampanye dengan model tersebut. Adapun dasar yang dijadikan argumentasi sebagaimana yang dikatakan informan bahwa mereka –relawan BGP Dapil I– sadar bahwa calon yang diusulkan bukan dari partai akan tetapi

²⁶ Veteran FSPMI merupakan anggota FSPMI yang tidak memiliki PUK karena sudah tidak bekerja di pabrik.

dari buruh. Oleh karena itu, slogan yang sering dimunculkan adalah “buruh pilih buruh” bukan pilih partai.²⁷ Berikut perolehan suara Nurdin Muhidin sebanyak 10.900. Adapun persebaran suara nurdin di enam kecamatan sebagai berikut;

Grafik 3.

Data Persebaran Suara Nurdin Muhidin di Dapil 1 pada Pemilu 2014



Sumber : Diperoleh dari wawancara dengan informan dan diolah oleh peneliti

Berdasarkan persebaran perolehan suara Nurdin dari enam kecamatan tersebut, di daerah Kecamatan Bojong Mangu hanya memperoleh 66 suara dan ini paling terkeci. Kecilnya perolehan suara di daerah tersebut disebabkan oleh tim relawan dapil I tidak menjadikan daerah tersebut sebagai fokus utama untuk sosialisasi dan kampanye. Tidak dijadikannya wilayah tersebut sebagai fokus utama untuk kampanye dengan dalih bahwa wilayah ini dianggap bukan basis buruh.

Sementara itu, perolehan suara Nurdin paling banyak tersebar di tiga daerah pemilihan; 1) Kecamatan Cikarang Selatan, 2) Kecamatan Serang Baru, dan 3) Kecamatan Cibarusa. Apabila ditotal perolehan suara Nurdin dari tiga kecamatan ini sebanyak 9719. Artinya,

²⁷ Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan salah satu informan, 10 Agustus 2015, di salah satu perumahan di Dapil I.

dari total 10.900 suara Nurdin yang diperoleh di dapil satu sebagian besar terpusat di tiga kecamatan ini. Secara spesifik apabila dilihat berdasarkan persebaran perolehan suara di tiap desa perkecamatan di tiga tersebut, perolehan suara Nurdin hanya berada di dua desa untuk di daerah Kecamatan Cikarang Selatan yaitu, Desa Ciantra dan Desa Sukadami. Sementara untuk di Kecamatan Serang Baru pun begitu, perolehan suara Nurdin hanya terpusat di dua desa yaitu, Desa Sukasari dan Desa Sukaragam. Untuk di Kecamatan Cibarusa, perolehan suara Nurdin masih terpusat di satu desa, Desa Sindang Mulya. Tujuh Desa yang tersebar di tiga kecamatan ini terdapat perumahan buruh dan merupakan basis pemukiman buruh FSPMI.

Berdasarkan penjelasan perolehan suara Nurdin di atas, sebenarnya basis suara Nurdin hanya berada di daerah perumahan buruh, di luar itu sangat kecil. Ini terjadi karena tim relawan dapil I berpendapat bahwa Nurdin adalah aktivis buruh dan caleg perwakilan buruh, maka fokus strategi kampanye dan sosialisasinya di daerah dengan pemilih yang punya latar belakang sebagai pekerja atau buruh pabrik. Data di atas pula menggambarkan bahwa karakteristik pemilih Nurdin sebagian besar adalah para anggota serikat pekerja FSPMI yang berdomisili di daerah pemilihan dapil I.

Pada proses penghitungan dan pembagian kursi anggota DPRD Kab. Bekasi di KPU. Nama Nurdin tidak lolos pada tahap pembagian pertama karena pada tahap pembagian pertama caleg yang mendapatkan kursi dipersyaratkan untuk memperoleh suara sebanyak 30.707 suara. Sementara itu, perolehan suara Nurdin hanya 10.900 suara dan ditambah suara dari akumulasi total caleg lain 11.300. Jadi total semua hanya 22.200. Pada proses pembagian bilangan pertama, kursi yang sudah dipilih ada 4 dari 9 kursi di dapilnya dan diperebutkan. Artinya masih ada 5 kursi tersisa. Pada proses pembagian sisa kursi selanjutnya, Nurdin mendapatkan satu kursi.

Terpilihnya Nurdin Muhidin sebagai caleg dengan kendaraan politik dari PAN disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, soliditas relawan BGP FSPMI Kab. Bekasi di Dapil

I. Soliditas ini dapat dilihat ketika proses sosialisasi dan masa kampanye sebagian besar sumber daya dan dana yang dikeluarkan dari anggota FSPMI Kab. Bekasi terutama yang berdomisili di Dapil I. Kedua, Dapil Nurdin merupakan basis buruh terutama buruh yang tergabung di FSPMI Kab. Bekasi. Salah satu informan mengatakan bahwa walaupun bukan Nurdin yang dicalonkan di dapil I sebagai calon legislatif, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Artinya calon tersebut akan berpoensi tetap terpilih sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi.²⁸

²⁸ Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan salah satu informan, 12 Agustus 2015, di salah satu perumahan dapil 1.

E. Relasi dan Interaksi Duta Politik dengan *Core Constitueen*

1. Relasi dan Interaksi Nyumarno dengan Relawan BGP Dapil VI FSPMI

Paska dilantik menjadi anggota dewan, Nyumarno membangun komunikasi dengan Relawan BGP Dapil VI ini dengan model seperti yang sudah dilakukan ketika proses elektoral yaitu melalui Relawan BGP Dapil VI. Relawan ini ketika proses elektoral satu sama lain saling berkomunikasi melalui sms center, media sosial seperti grup whatsapp dan facebook, dan melakukan pertemuan-pertemuan langsung.

Adapun kegiatan relawan ini mendukung aktivitas-aktivitas yang diperlukan dewan, misalnya data tentang orang miskin dan jalan rusak. Data-data ini kemudian akan ditindak lanjuti oleh Nyumarno untuk segera diusulkan melalui APBD Perubahan 2015 ataupun RKPD Online 2015 di DPRD. Selain itu, aktivitas Relawan BGP Dapil VI ini mengawal program BPJS Kesehatan dan kasus-kasus perburuhan yang terjadi di pabrik. Relawan ini mengadvokasi, misalnya langsung melaporkan ke Nyumarno, apabila ada warga yang terkendala terkait BPJS Kesehatan ataupun masalah perburuhan di pabrik.

Relawan BGP Dapil VI dan Nyumarno pula membuat secara bersama-sama satu yayasan. Yayasan ini bernama Yayasan Aspirasi Rakyat Mandiri [Asrama]. Yayasan ini fokus pada tiga sektor yaitu, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Adapun pola komunikasi Yayasan Asrama dan Nyumarno tidak jauh berbeda dengan Relawan BGP Dapil VI. Aktivitas Yayasan Asrama ini diharapkan salah satunya untuk mengerjakan ataupun membantu menyalurkan program-program pemerintah yang diberikan ke warga.

Adapun pembina dari yayasan ini adalah Obon Tabroni. Semetara posisi ketua, sekretaris, bendahara, serta pengurus yayasan ini merupakan individu-individu yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara Relawan BGP Dapil VI. Adapun sumber pendanaan didapat melalui donatur, baik dari dewan, sukarelawan, maupun usaha-usaha kecil. Yayasan ini berdiri di luar struktur FSPMI, akan tetapi semua pengurusnya adalah

aktivis FSPMI yang berada di dapil VI. Hingga hari ini yayasan ini belum berjalan maksimal. Tidak berjalannya maksimal yayasan ini karena sibuk dengan aktivitas-aktivitas masing, dan sebagian relawan masih sibuk mengurus usaha-usaha kecil.

Adapun telaah relasi dan interaksi antara Nyumarno dengan anggota serikat berjalan baik, terutama dengan buruh di dapil VI. Misalnya Nyumarno melakukan pertemuan secara periodik dan insedentil dengan beberapa relawan di dapil VI dan bahkan dengan serikat pekerja di luar FSPMI. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Nyurmano menyampaikan pekerjaan yang telah dilakukan baik dari sisi pengawasan, politik anggaran, hingga legislasi. Dari sisi legislasi Nyumarno pula mengusulkan tiga Raperda Ketenagakerjaan, Raperda Kesehatan Kerja, Raperda CSR.

Sementara dari sisi politik anggaran, Nyumarno mengusulkan beberapa program yang berhubungan langsung dengan buruh, misalnya anggaran Pekan Olah Raga Serikat Pekerja. Sementara dari fungsi pengawasan, Nyumarno telah melakukan sidak secara langsung ke pabrik-pabrik yang tidak berpihak kaum buruh. Sidak ini dilakukan berdasarkan laporan langsung dari pengurus unit kerja FSPMI atau serikat pekerja di luar FSPMI. Namun proses penanganan yang dilakukan oleh Nyumarno menimbulkan masalah baru terkait posisi serikat pekerja, misalnya ada beberapa kasus yang seharusnya selesai ditangani ditingkat PUK, akan tetapi dilaporkan langsung ke Nyumarno. Temuan ini bukan hanya terjadi pada serikat pekerja di luar FSPMI, akan tetapi terjadi pula pada sebagian pengurus PUK-PUK di FSPMI yang langsung melaporkan ke Nyumarno tanpa melalui proses mekanisme pelaporan terlebih dahulu ke Pengurus Cabang FSPMI Kab. Bekasi.

Berdasarkan narasi di atas, dampak yang terjadi secara tidak langsung adalah terjadinya disfungsi Pengurus Cabang FSPMI Kab. Bekasi. Dititik ini sebenarnya terlihat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Nyumarno ketika menjabat sebagai anggota DPRD lebih kuat dibandingkan serikat pekerja ketika melakukan sidak ke pabrik-pabrik. Apabila

kekuasaan yang dimiliki Nyumarno ini tidak diatur dengan model komunikasi yang baik dengan serikat pekerja, maka kondisi ini akan berpotensi terjadinya relasi ketergantungan anggota serikat pekerja kepada Nyumarno.

2. Relasi dan Interaksi Nurdin Muhidin dengan Relawan BGP Dapil I FSPMI

Paska terpilihnya Nurdin Muhidin, adapun model relasi dan interkasinya hanya bersifat insidental, misalnya apabila ada hajatan buka bersama. Selain itu, komunikasi dilakukan dengan media sosial misalnya group WhatsApps. Sebenarnya paska terpilihnya Nurdin Muhidin sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi, pihak nurdin dan teman-teman Relawan BGP Dapil I telah menyusun program untuk bertemu secara periodik dua minggu sekali, akan tetapi program ini tidak berjalan sama sekali. Tidak berjalannya program ini ini disebabkan oleh model komunikasi yang dibangun antara Nurdin dan Relawan BGP Dapil I belum berjalan dengan baik. Salah satu informan mengatakan bahwa model komunikasi Nurdin tidak cukup baik, misalnya Nurdin tidak cepat menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di dapilnya. Kondisi ini mengakibatkan tingkat kepercayaan sebagian relawan kepada anggota DPRD dari FSPMI Dapil I, Nurdin, sudah mulai menurun.²⁹ Ada dua penyebab penting tingkat kepercayaan relawan menurun terhadap Nurdin. Pertama, Nurdin kerap menjanjikan untuk bertemu, akan tetapi tidak pernah terealisasi. Kedua, relawan merasa bosan dengan materi yang disampaikan setiap pertemuan, misalnya setiap pertemuan insidental, materi yang disampaikan relatif sama dengan pertemuan yang telah dilakukan.

Selain menurunnya tingkat kepercayaan relawan terhadap Nurdin, berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan, bahkan ada beberapa relawan yang jarang melakukan konsolidasi bersama relawan dan lebih sering mengadu ke Nyumarno. Kondisi ini terjadi karena Nyumarno lebih cepat menanggapi dan menangani terkait pengaduan ataupun persoalan yang terjadi di masyarakat dibandingkan Nurdin.

²⁹ Dokumen notulen wawancara penulis artikel ini dengan salah satu informan, 10 Oktober 2015, di salah satu perumahan dapil I.

Model komunikasi Nurdin yang tidak cukup baik ini ditengarai penyebabnya antara lain: Pertama, Nurdin tidak mempunyai pengalaman dalam politik praktis sebelumnya, dia dikenal hanya sebagai orator disetiap aksi-aksi buruh FSPMI di tingkat nasional. Kedua, Nurdin tidak pernah mengalami satu ketertindasan seperti yang dialami Nyumarno dalam melakukan advokasi panjang dengan PT Kymco. Akibatnya jalan politik yang diambil Nurdin lebih hati-hati dan cenderung tidak berkarakter *fighter* seperti Nyumarno. Kondisi ini menjadi masalah tersendiri dalam dunia politik praktis. Ketiga, minimnya inisiatif atau gagasan dari duta politik dapil satu, Nurdin. Meskipun relawan Dapil I telah menginisiasi untuk melakukan pertemuan rutin, akan tetapi minim tanggapan.

Namun temuan observasi di lapangan, dari sisi fungsi legislasi ditemukan bahwa Nurdin ikut terlibat dalam penyusunan Raperda tentang Ketenagakerjaan. Keterlibatan ini karena Nurdin merupakan Ketua Badan Legislasi di DPRD Kabupaten Bekasi. Walaupun Nurdin merupakan Ketua Badan Legislasi, akan tetapi temuan observasi di lapangan bahwa Nurdin kurang aktif dalam aktivitas telaah dan kajian Raperda tentang Ketenagakerjaan tersebut, terutama di level serikat pekerja FSPMI. Usulan-usulan di dalam Raperda Ketenagakerjaan dan telah disahkan menjadi Perda Ketenagakerjaan pada Agustus 2016, sebagian besar isi dari perda tersebut merupakan hasil kajian yang disusun secara bersama oleh para pengurus dan anggota serikat pekerja FSPMI, terutama Obon Taboroni, Amir Mahcfud, Suparno, bahkan Nyumarno sebagai duta politik dari FSPMI.

F. Kesimpulan

Terpilihnya dua duta politik –Nyumarno dan Nurdin– dari anggota FSPMI Kab. Bekasi sebagai anggota DPRD di Kab. Bekasi patut diapresiasi oleh gerakan masyarakat sipil di Indonesia, dari soal strategi, mesin organisasi pemenangan, pembiayaan kampanye yang dilakukan dengan cara “saweran. Secara sederhana kedua calon dan mesin politiknya, FSPMI Kab. Bekasi, tidak melakukan korupsi pemilu pada fase pra elektoral, elektoral hingga paska elektoral. Namun demikian, pada fase paska elektoral kedua duta politik ini memiliki perbedaan dalam membangun relasi dan interaksi dengan konstituennya terutama buruh FSPMI.

Berdasarkan uraian data dan penjelasan dalam tulisan ini sebelumnya, peneliti menyimpulkan adanya relasi dan interaksi yang mengarah pada model representasi substantif antara Nyumarno dengan konstituennya, terutama buruh FSPMI di Dapil VI. Indikator Nyumarno melakukan model representasi yang mengarah pada substansial dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukannya. Misalnya berdasarkan fungsi pengawasan, Nyumarno berupaya dan berhasil mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi untuk memutasi Kepala Seksi Kesehatan Keselamatan Kerja [K3], yang dianggap oleh anggota serikat pekerja, terutama FSPMI Kab. Bekasi, tidak bekerja secara maksimal. Lebih dari itu, Nyumarno ini cukup aktif melakukan “grebek” terhadap pabrik-pabrik yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh, dan aktif membangun komunikasi melalui media sosial dan forum insidentil dengan konstituennya, bahkan dengan buruh yang tidak tergabung dengan FSPMI Kab. Bekasi.

Berdasarkan fungsi legislasi, Nyumarno berperan besar dan aktif dalam mendorong rancangan peraturan daerah [Raperda] yang diharapkan atau sesuai dengan kepentingan buruh, yaitu Raperda Ketenagakerjaan dan disahkan menjadi Perda Ketenagakerjaan, Raperda Kesehatan Kerja, dan Raperda CSR. Secara khusus Nyumarno terlibat aktif dalam aktivitas telaah dan kajian Raperda tentang Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan serikat

pekerja FSPMI Kab. Bekasi. Diusulkanya ketiga raperda dan aktif terlibat dalam aktivitas kajian tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Nyumarno menyuarakan aspirasi buruh yang lebih luas, bukan hanya buruh yang tergabung dengan FSPMI Kab. Bekasi. Oleh karena itu, berdasarkan temuan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa secara teoritik relasi dan interaksi yang dilakukan oleh Nyumarno ini mengarah kepada model representasi substantif. Representasi yang bertindak dan berbuat sesuai dengan pandangan, gagasan, dan kepentingan dari kelasnya yaitu buruh.

Sementara itu, relasi dan interaksi yang dibangun oleh Nurdin dengan konstitueenya, terutama buruh yang tergabung dengan FPSMI Kab. Bekasi di Dapil VI, cenderung mengarah pada model representasi deskriptif dan belum mengarah ke model representasi substantif. Representasi deskriptif ini merupakan representasi yang lebih menekankan bahwa bentuk perwakilan yang hanya didasarkan adanya kesamaan antara yang mewakili dan diwakili dan cenderung tidak mengarah pada tindakan yang lebih substansial. Adapun indikator Nurdin melakukan relasi dan interaksi yang mengarah pada model representasi deskriptif ini dapat didasarkan pada aktivitas yang dilakukannya. Misalnya Nurdin kerap tidak menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di dapilnya dan walaupun Nurdin kerap menjanjikan untuk bertemu, akan tetapi tidak pernah terealisasi. Selain itu, dari sisi fungsi legislasi ditemukan bahwa keterlibatan Nurdin kurang aktif dalam aktivitas telaah dan kajian Raperda tentang Ketenagakerjaan, terutama yang dilakukan oleh serikat pekerja FSPMI Kab. Bekasi. Usulan-usulan di dalam Raperda Ketenagakerjaan dan telah disahkan menjadi Perda Ketenagakerjaan pada Agustus 2016, sebagian besar isi dari perda tersebut merupakan hasil kajian yang disusun secara bersama oleh para pengurus dan anggota serikat pekerja FSPMI Kab. Bekasi, terutama Obon Taboroni, Amir Mahcfud, Suparno, bahkan Nyumarno sebagai duta politik dari FSPMI.

Walaupun ada perbedaan model relasi dan interaksi yang terbangun pada kedua duta politik tersebut, tetapi sederet keberhasilan inisiatif buruh go politik di FSPMI Kab Bekasi

misalnya tidak adanya praktik korupsi pemilu pada fase elektoral, elektoral, hingga paska elektoral, patut untuk diapresiasi. Namun, sederet keberhasilan tersebut tidak terlepas dari catatan kritik. Ada poin-poin mendasar sebagai kritik dan dapat dijadikan bahan refleksi untuk gerakan buruh “go politics” selanjutnya. **Pertama**, meskipun ada indikasi mengarah pada terjadinya model representasi substantif antara Nyurmano dengan konstituennya terutama FSPMI Kab. Bekasi, namun model representasi yang berlangsung dan terbangun belum pada level *democratic representation*. Ini dibuktikan pada proses penyusunan dan melakukan kajian Raperda Ketenegakerjaan, yang hanya melibatkan petinggi di FSPMI Kab. Bekasi dan tidak melibatkan anggota FSPMI di tingkat *grass root* serta kelompok buruh dari berbagai serikat. Selain itu, sebagai bukti tambahan bahwa belum terjadinya *democratic representation* adalah tidak adanya model akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh kedua calon terhadap konstituen mereka secara periodik. Aktivitas yang dilakukan oleh Nyumarno lebih mengarah pada bentuk akuntabilitas politik kepada konstituen terutama terkait kegiatannya selama di DPRD.

Kedua, proses pendampingan kasus-kasus yang terjadi di tingkat Pengurus Unit Kerja [PUK], yang secara langsung dilaporkan kepada dua duta politik ini –Nyumarno dan Nurdin– dan tanpa melaporkan ke Pengurus Cabang [PC] Serikat Pekerja, berpotensi terjadinya disfungsi kerja-kerja serikat. Kondisi ini berpotensi terjadinya relasi ketergantungan, atau bahkan relasi patronase anggota serikat kepada Nyumarno dan Nurdin daripada memperkuat fungsi-fungsi organisasi serikat pekerja FSPMI. **Ketiga**, kemenangan buruh *go politics* ini pula belum diimbangi dengan gerakan buruh “go ekonomi” untuk memutus modus produksi dalam konteks kapitalisme. Gerakan buruh “go ekonomi” ini penting dilakukan karena ditemukan adanya sebagian, walupun sangat kecil, relawan buruh *go politics* FSPMI yang terkena pemutusan hubungan kerja dari pabrik karena lebih dari dua minggu tidak masuk kerja dan sibuk mengawal proses pemenangan duta politik. Akibatnya paska elektoral relawan ini tidak ada sumber pendapatan agar asap dapur terus mengepul, yang pada akhirnya mengharuskan relawan tersebut untuk pulang ke kampung halaman.

Terlepas dari kritik tersebut, kemenangan kecil ini tentu dapat dijadikan pelajaran dan memberikan harapan baru bagi entitas masyarakat sipil lainnya untuk melakukan eksperimentasi politik di daerah lain. FSPMI Kab. Bekasi telah melakukan eksperimentasi politik pada Pemilu Legislatif 2014 di Kab. Bekasi. Eksperimentasi politik ini pun berlanjut dengan majunya Obon Tabroni, Vice Presiden DPP FSPMI, sebagai salah satu calon bupati independen pada Pilkada 2017. Eksperimentasi ini menjadi tantangan bagi serikat pekerja FSPMI untuk menguji soliditas anggota pada Pilkada 2017. Di lain sisi, eksperimentasi politik ini akan menjadi jebakan tersendiri apabila individu serikat pekerja ataupun individu dari kelompok masyarakat sipil lainnya yang ikut mendukung terjebak dengan gelombang korupsi pemilu.



Institute for
Strategic Initiatives

www.insistive.org

Institute for Strategic Initiative

Jl. Perdatam VI No. 5-6, Pancoran,

Jakarta Selatan, Indonesia, 12770

Phone: +62 21 799 5069

Email: contact@insistive.org

www.insistive.org

www.facebook.com/insistive